BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Di negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan negara demokrasi seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945, supremasi konstitusi termasuk bagian dari pelaksanaan. Konstitusi dinilai sebagai landasan dari segala peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada warga negara. Oleh sebabnya, kita mengenal hierarki perundang-undangan dan tidak ada yang dapat bertentangan dengan konstitusi.

Sistem hukum di Indonesia yang menganut kodifikasi hukum berpengaruh terhadap penyusunan dan pembentukan undang-undang sebagai naskah hukum. Pembagian kategori secara materiil atau formal menegaskan kepada masyarakat dalam melihat dan menilai setiap undang-undang. Hal ini berpengaruh terhadap koridor hukum bagi pengimplementasian kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menjaga dan mengawasi setiap pembentukan undang-undang yang mengedepankan kepentingan rakyat. Juga bentuk peraturan yang tertulis mempunyai dampak penting dalam sistem kodifikasi hukum agar menciptakan kepastian dan penafsiran yang jelas oleh umum, sehingga masyarakat dapat dengan jelas mengetahui peraturan-peraturan yang harus ditaati dan peraturan-peraturan yang melanggar hak asasi.

Dalam praktek pengujian undang-undang terdapat mekanisme putusan sela atau putusan provisi yang bisa diartikan sebagai penghentian sementara pemberlakuan undang-undang sampai Majelis Hakim Konstitusi menetapkan putusan akhir, antara menolak, mengabulkan, atau tidak dapat menerima permohonan. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi mengedepankan prinsip-prinsip yang menjadi esensi dari negara hukum dan mencerminkan tatanan nilai yang dikandung konstitusi. Namun, pengaturan mengenai permohonan putusan provisi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis. Hal tersebut tidak mencerminkan eksistensi dari negara hukum dalam mengedepankan perlindungan hak asasi.

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan pengujian keselarasan norma sekaligus bentuk analisa dampak dari pemberlakuan undang-undang bagi hak konstitusional pemohon yang dilindungi UUD 1945. Dengan adanya teori putusan

provisi semakin mendukung bentuk perlindungan hak konstitusional dari setiap warga negara yang terdampak dari suatu undang-undang walaupun sifatnya hanya sementara.

Banyak kasus pada pengujian undang-undang yang mengajukan permohonan putusan provisi ditolak dengan dalih bahwa undang-undang mengatur untuk umum sehingga tidak dapat dihentikan sementara hanya bagi pemohon. Berbeda dengan undang-undang yang mempunyai sifat personal seperti pada kasus dengan nomor perkara 133/PUU-VII/2009, bahwa materi yang diujikan hanya berlaku bagi pimpinan KPK sehingga putusan provisi memungkinkan untuk dikabulkan. Ditambah, dalam putusan di kasus tersebut dijelaskan terdapat indikasi perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang dimana putusan provisi pada kasus sengketa kewenangan lembaga negara diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi, dapat disimpulkan permohonan putusan provisi dalam pengujian undang-undang tidak mempunyai kedudukan karena tidak diatur secara tertulis sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang dapat diinterpretasi oleh Majelis Hakim Konstitusi sesuai dampak dan akibat yang akan ditimbulkan. Dengan akibat hukum ketidaktahuan masyarakat akan salah satu mekanisme hukum acara yang dapat diajukan. Di lain sisi, ketiadaan kedudukan permohonan putusan provisi dalam pengujian undang-undang dikarenakan setiap undang-undang berlaku untuk umum atau dapat diartikan bahwa undang-undang tidak hanya berlaku bagi pemohon yang melakukan pengujian undang-undang.

5.2 Saran

Negara dalam hal ini DPR dan Presiden, dapat melakukan pertimbangan untuk merevisi undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan aspek permohonan putusan provisi dalam melakukan pengujian undang-undang karena keberlangsungan suatu undang-undang yang sedang diujikan dapat terus merugikan hak pemohon. Dilihat dari fakta lapangan bahwa waktu dalam beracara di Mahkamah Konstitusi yang cukup lama--ditambah dengan sifat tidak berlaku surut dari pemberlakuan suatu undang-undang.